

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari keinginan untuk mengakhiri peperangan berdarah antar negara yang sudah memuncak pada Perang Dunia ke II, pada tahun 1950 komunitas batubara dan baja Eropa membentuk suatu komunitas yang dapat menyatukan negara-negara Eropa secara ekonomi dan politik untuk menjamin perdamaian abadi. Tahun dimana wilayah Eropa didominasi oleh perang dingin antara Timur dan Barat serta protes di Hungaria terhadap Rezim Komunis. Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda merupakan keenam pendiri komunitas tersebut. Pada tahun 1957, Traktat Roma menciptakan *European Economic Community* (EEC), atau 'Common Market' (Lestari, 2017, p. 1025).

European Economic Community (EEC) kemudian berubah nama menjadi Uni Eropa. Awal kemunculannya Uni Eropa menjadi harapan bagi negara-negara di Eropa yang pada saat itu marak terjadi konflik. Sehingga Denmark, Irlandia dan Inggris tertarik untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1973, meningkatkan jumlah negara anggota menjadi sembilan orang. Perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1973 menghasilkan krisis energi dan masalah ekonomi di Eropa. Sehingga Uni Eropa mulai mengeluarkan kebijakan regional dengan mulai mentransfer sejumlah besar uang untuk menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur.

Uni Eropa juga mulai mengadopsi beberapa undang-undang untuk alasan keamanan dan keselamatan seperti gagasan '*the polluter pays*' untuk melindungi lingkungan dan 'Pasar Tunggal' dalam menangani masalah arus perdagangan bebas yang melintasi perbatasan Uni Eropa. Pada tahun 1990-an, Eropa dilanda krisis ekonomi global dan keberadaan Uni Eropa pada saat itu dapat membantu beberapa negara untuk menghadapi kesulitan mereka dan menetapkan 'Serikat Perbankan' untuk memastikan bank-bank yang lebih aman dan dapat dipercaya. Kehadiran Uni Eropa yang memberikan angin

segar setiap kali ada permasalahan dalam negeri tersebut membuat negara-negara di wilayah Eropa percaya akan masa depannya di Uni Eropa. Sehingga pada tahun 2013, Uni Eropa berubah menjadi organisasi terbesar di Eropa dengan 28 anggota tetap, yaitu Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedia, Inggris, dan Kroasia (europa.eu, 2018).

Pada perkembangannya, Uni Eropa menjadi institusi supranasional yang dapat mengatur negara-negara yang menjadi anggotanya. Awal terbentuknya Uni Eropa adalah untuk memperbaiki perekonomian negara-negara Eropa tetapi seiring perkembangannya meluas menjadi sebuah organisasi yang dapat membawahi negara-negara Eropa dengan menerapkan beberapa kebijakan. Seperti kebijakan keamanan, keadilan, imigrasi bahkan kebijakan tersebut sampai mengatur tentang lingkungan, iklim dan kesehatan. Uni Eropa berperan penting dalam segala kegiatan negara-negara anggotanya. Uni Eropa telah berperan menyelamatkan negara-negara anggota dari permasalahan seperti krisis ekonomi dengan menerapkan sistem mata uang tunggal yaitu euro. Sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara anggota. Penggunaan euro sebagai mata uang diadopsi oleh lebih dari 19 negara.

Kesatuan yang dibentuk oleh negara-negara anggota Uni Eropa ini menciptakan kebijakan pergerakan bebas memasuki kawasan Eropa. Dihapuskannya batas-batas negara sehingga dapat dengan mudah memasuki di negara-negara yang termasuk dalam anggota Uni Eropa. Entah untuk tinggal menetap atau hanya sekedar liburan. Semua yang dilakukan Uni Eropa didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati secara sukarela dan demokratis oleh negara-negara anggota. Hukum dan keadilan ditegakkan oleh pengadilan yang independen. Negara-negara anggota memberikan yurisdiksi terakhir ke Pengadilan Eropa yang harus dihormati oleh semua pihak.

Namun pada kenyataannya, Uni Eropa terkadang bersikap tidak adil dalam memperlakukan negara-negara anggota. Banyak peraturan yang dianggap memberatkan, sehingga berujung pada penolakan terhadap konsep dan gagasan yang ditawarkan oleh Uni Eropa seperti kedaulatan bersama, tata kelola multilevel Eropa dan demokrasi supranasional. Uni Eropa dianggap banyak melakukan intervensi yang membuat negara-negara anggota kehilangan kendali untuk mengatur dirinya sendiri. Bahkan kebijakan Uni Eropa sudah menyentuh sisi-sisi internal dan dianggap mengganggu kedaulatan negara. Nasionalisme negara bergeser dan lebih banyak tunduk pada kebijakan Uni Eropa. Banyak kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat, bahkan sering kali bertentangan dengan konstitusi negara anggotanya.

Hal ini diperlihatkan dengan meningkatnya kaum *Euro sceptic* di seluruh Eropa. Sekitar dua-pertiga dari negara Inggris dan Yunani, bersama dengan minoritas yang signifikan di negara-negara lain (Uni Eropa Reporter Koresponden, 2018). Kata *Euro sceptic* pertama kali muncul pada 11 November 1985 dalam koran Inggris, *The Times*, untuk mengga mbarkan oposisi skeptis terhadap Uni Eropa dan kebijakan-kebijakannya. *Euro sceptic* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *Euro* dan *Sceptic*. *Euro* berarti Eropa dan *Sceptic* berarti seseorang yang ragu atau menolak penyatuan-penyatuan negara di Eropa. Dalam kamus Cambridge, *Euro sceptic* diartikan sebagai kata benda, yaitu seseorang atau lebih tepatnya politikus yang menentang hubungan dekat yang terjalin antara Inggris dengan Uni Eropa.

Penolakan terhadap sistem Uni Eropa memunculkan sebuah gerakan yang disebut dengan Brexit (*Britain Exit*) di Inggris. Sebuah gerakan yang menunjukkan keinginan sebagian besar masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Hal tersebut dikuatkan dengan referendum yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron pada tahun 2016. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, referendum diartikan sebagai kata benda yang mempunyai arti penyerahan

suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).

Referendum yang dikeluarkan oleh David Cameron bukan tanpa alasan. Gagasan referendum ini telah lama dijadikan komoditas politik jelang pemilu di Inggris. Bahkan pada tahun 2004, sudah ada petisi online yang diajukan oleh kaum *Eurosceptic* dan ditandatangani oleh masyarakat Inggris tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Referendum Brexit terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di dalam Inggris hingga menjelang pemilu, David Cameron yang pada saat itu maju sebagai calon kandidat berjanji untuk menggelar referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa, jika partainya bisa memenangkan pemilu parlemen tahun berikutnya sebagai penarik hati masyarakat. Terjadi sikap pro dan kontra antara masyarakat Inggris atas referendum ini. Bahkan di dalam partai konservatif sendiri terjadi perpecahan yang mana Perdana Menteri, David Cameron bersikukuh Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa sedangkan lawannya yang separtai seperti mantan Wali Kota, Boris Johnson memilih untuk hengkang. Di belakang David Cameron ada Ketua Umum Partai Buruh, Jeremy Corbyn yang ikut berpendapat agar Inggris tetap mempertahankan status keanggotaannya di Uni Eropa. Menurut politikus yang lain yang berada di partai konservatif seperti Michael Gove dan Priti Patel, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan lebih mudah mengurus masalah yang berkaitan dengan imigran pasalnya Inggris tidak perlu menerapkan kebijakan yang telah dibuat (Aya, 2016).

Selain politikus di atas, beberapa juga menjadi kubu pro Brexit yang menyatakan setuju jika Inggris hengkang dari Uni Eropa. Hal ini diwakili oleh sikap dengan sayap kanan dalam pemerintahan yang menolak penetapan kuota untuk penerimaan pengungsi (Lucas, 2016). Mereka meyakini Brexit merupakan solusi tepat untuk menuntaskan isu imigran. Dengan tidak menjadi anggota Uni Eropa, Inggris dapat melindungi identitas

dan tradisinya yang sudah ada secara turun temurun tanpa tercampur budaya asing yang dibawa oleh imigran. Kemudian isu imigran ini menjadi komoditas politik yang didengungkan dalam kampanye oleh kubu pro Brexit.

Ketidakstabilan kondisi yang disebabkan oleh perang sipil di Suriah maupun di negara-negara Timur Tengah lainnya secara tidak langsung memberikan dampak terhadap Uni Eropadengan munculnya gelombang massal para imigran pencari suaka ke Eropa, utamanya Inggris. Imigran adalah seseorang yang telah meninggalkan negara asalnya dan untuk alasan apa pun berusaha untuk membangunnya atau dirinya sendiri di tempat lain. Definisi sosial yang luas ini mencakup pencari suaka dan pengungsi yang diakui serta banyak kategori spesifik dan legal lainnya (Takle, 2015, p. 05).

Berbagai jenis imigran yang masuk ke kawasan Uni Eropa, seperti imigran ekonomi, pencari suaka, imigran gelap dan pekerja musiman atau sementara. Karena semakin sulit memasuki Uni Eropa sebagai imigran ekonomi jangka panjang, telah terjadi kecenderungan untuk mencari bentuk akses lainnya, seperti suaka. Sehingga sangat sulit untuk membedakan apakah pengungsi melarikan diri dari kemiskinan atau penganiayaan. (Nello, 2005, p. 160). Mereka melakukan migrasi besar-besaran dengan berbagai cara. Melalui jalur darat dengan menembus gerbang perbatasan Eropa maupun melalui jalur laut dengan menyeberangi laut Mediterania demi mendapatkan suaka di antara naungan negara-negara Uni Eropa.

Tahun 2015 merupakan tahun dimana gelombang pengungsi yang memasuki kawasan Eropa meningkat secara tajam. Krisis pengungsi di Eropa muncul saat keimigrasian menjadi isu politik besar di Inggris (Apriliana, 2015). Berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bahwa pada tahun 2014 jumlah Imigran yang memasuki Inggris melonjak tajam sebesar 1,5x lipat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 24% atau sama dengan 216.300 orang. Biaya hidup tinggi tidak melumpuhkan niat imigran yang datang ke Inggris untuk tinggal dan menetap.

Sehingga pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5x lipat. Konflik yang terjadi di Suriah dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga menyebabkan pengungsi berbondong-bondong memasuki kawasan Eropa. Tercatat pada bulan Agustus 2015 sebesar 313.000 jiwa yang diantaranya memasuki negara Jerman sebesar 89.000 jiwa, Swedia sebesar 62.000 jiwa. Hal ini menjadikan Suriah sebagai kelompok terbesar pengungsi yang memasuki wilayah Eropa.

Menurut Konvensi Jenewa pada tahun 1951, yang bersangkutan dengan pengungsi dan pencari suaka pada pasca perang, adalah pengungsi sebagai orang yang berada di luar negara diakibatkan oleh rasa takut yang timbul dari penganiayaan dari kelompok ras, agama, kebangsaan, keanggotan terhadap suatu kelompok tertentu atau opini politik (Fadli, 2017). Masuknya pengungsi secara besar-besaran ini menciptakan perdebatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri. Menurut negara-negara penolak, pengungsi hanya dapat menimbulkan masalah baru di Uni Eropa seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk memberikan ketentuan sosial yang diperlukan bagi orang asing dan gangguan sosial akibat perbedaan budaya (Nello, 2005, p. 146).

Negara juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk kesejahteraan para pengungsi. Sebab, dengan latar belakang keterbatasan pendidikan dan tekanan dari negara asalnya pengungsi cenderung tidak bisa beradaptasi dengan cepat di negara pemberi suaka. Sebaliknya, di negara tujuan kadang-kadang diklaim bahwa arus masuk pekerja muda dapat digunakan untuk mengimbangi kemungkinan dampak negatif dari penuaan populasi, atau imigran dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan keterampilan (Nello, 2005, p. 144).

Sebagian negara-negara di Uni Eropa seperti Jerman merasakan keuntungan dengan pemberian suaka kepada pengungsi karena seperti yang diketahui Jerman adalah salah satu negara di Uni Eropa yang memiliki tingkat kelahiran rendah sehingga mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Dengan adanya arus imigrasi ini Jerman mampu mendongkrak perekonomiannya. Namun, penerimaan imigran

secara besar-besaran juga beresiko tinggi jika dilihat dari latar belakang mereka melakukan migrasi ke kawasan Eropa. Sehingga dari tahun 1993 Jerman menjadi lebih ketat dalam menerima permintaan suaka. Ketika Jerman menjadi lebih ketat tentang suaka, jumlah permintaan di Inggris dan Irlandia meningkat tajam, karena negara-negara ini dianggap sebagai negara dengan catatan klaim penerimaan yang lebih tinggi (Nello, 2005, p. 149).

Perbedaan tanggapan dalam menyikapi pengungsi ini disebabkan karena adanya kebijakan kuota pengungsi antar negara dan juga beberapa penolakan oleh negara-negara anggota seperti Hungaria, Inggris, Swedia, Denmark, dan juga Slovakia. Permasalahan pengungsi di negara-negara Eropa sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat kompleks bagi negara yang bersangkutan. (Fadli, 2017).

Lain halnya dengan kubu kontra Brexit yang menganggap bahwa Brexit akan membuat Inggris rentan terhadap serangan teror dan bahwa kamp-kamp migran akan bermunculan di Timur Inggris Selatan. Perdana Menteri Inggris, David Cameron membawa masalah keamanan nasional sebagai inti dari kampanyenya untuk mempertahankan Inggris di Uni Eropa. Cameron memperingatkan bahwa Brexit akan memimpin kamp-kamp imigran ilegal di Inggris karena Prancis dapat berhenti mengizinkan pejabat Inggris melakukan pemeriksaan imigrasi mereka di sisi perbatasan Prancis (Peter Dominiczak, 2016). Dua mantan perdana menteri Inggris, Sir John Major dan Tony Blair juga memperingatkan bahwa keluar dari Uni Eropa akan berdampak merusak kesatuan Britainia Raya itu sendiri (BBC, 2018).

Setelah melalui perjalanan yang panjang, hasil referendum Brexit resmi diumumkan pada Jumat, 24 Juni 2016. Kubu Brexit menang dengan perolehan suara sebesar 51,5% dari kubu penolak. Hasil tersebut menandakan bahwasanya Inggris resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Inggris merupakan satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang memilih bercerai dengan organisasi yang selama ini menaunginya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi

momen bersejarah sejak berdirinya Uni Eropa selama 60 tahun terakhir. Inggris bergabung Uni Eropa sejak tahun 1973 silam, bahkan sejak nama Uni Eropa menggunakan nama terdahulu, yakni *European Economic Community* (EEC) (Lestari, 2017, p. 1027).

Brexit menjadikan perdebatan di dalam maupun di luar Inggris. Sebagian menganggap bahwa keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa akan mendatangkan kerugian yang cukup banyak untuk Inggris karena akan menutup akses-akses yang dulunya mudah ke Uni Eropa. Sebagian menganggap langkah yang tepat karena Inggris dapat secara mandiri mengurus negaranya dan tidak perlu dibebani masalah-masalah yang ada di Uni Eropa.

Seperti yang dilansir dari BBC, Imigran menjadi salah satu faktor masyarakat menginginkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sebab Inggris menjadi salah satu negara yang menampung Imigran dalam jumlah yang sangat besar. Besarnya Imigran tersebut dapat menjadi masalah baru dan hanya menambah beban sehingga dengan keluarnya dari Uni Eropa dapat membendung Imigran yang masuk ke negaranya karena Inggris tidak lagi terikat kebijakan Uni Eropa tentang kebebasan pergerakan manusia.

Aktor yang sangat berpengaruh dalam munculnya gerakan Pro-brexit digagas oleh Partai nasionalis kanan Inggris, UKIP (*United Kingdom Independence Party*) yang sebenarnya bukan bagian dari partai-partai utama. Namun mereka mampu menggiring opini publik. UKIP mendekati diri pada masyarakat yang tidak percaya terhadap elite politik. Salah satu pemicu dalam meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada elite pemerintah, yakni krisis pengungsi (Christiastuti, 2016). Dalam jajak pendapat terakhir Juni silam, sebanyak 47% penduduk Inggris menolak kedatangan pengungsi, bahkan mereka yang melarikan diri dari perang Suriah sekalipun. Hanya 29% masyarakat yang mendukung kebijakan ramah pengungsi (Shackle, 2015).

Menarik untuk dikaji lebih dalam terkait upaya yang dilakukan UKIP dalam memanfaatkan isu krisis pengungsi

sebagai isu utama untuk mendorong masyarakat Inggris menyetujui Referendum Brexit. Mengingat, UKIP bukanlah partai sentral di Inggris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya UKIP (*United Kingdom Independence Party*) memanfaatkan isu krisis pengungsi dalam referendum Brexit tahun 2016?”

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebagai pijakan berfikir yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menjawab hipotesa atas rumusan masalah. Pada kerangka pemikiran ini penulis memakai satu konsep dan satu teori. Konsep yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah konsep kampanye yang dirasa tepat dalam mendeskripsikan permasalahan diatas.

Konsep Kampanye

Secara etimologis, istilah kampanye berasal dari Bahasa Inggris, yaitu campaign yang secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal secara persuasif (Arifin, 2011, p. 153). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara. Imawan mengungkapkan dalam(Cangara, 2016:239) bahwa kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sedangkan menurut Kotler dan Roberto dalam(Cangara, 2016:245) “*Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopters), to*

accept, modify, or abandon, certain ideas, attitudes, practices and behaviour.”

Kampanye adalah suatu upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mempersuasi orang lain agar mengubah pemikiran, ide, perilaku maupun tindakan (Prof. Hafied Cangara, 2016, p. 245). Venus berpendapat bahwa aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yakni, (1) ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) ditujukan kepada jumlah masyarakat sasaran yang besar (3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Adapun tujuan kampanye menurut Pflau dan Parroth adalah upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam aspek pengetahuan diharapkan akan munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu tertentu, yang kemudian adanya perubahan dalam ranah sikap. Pada tahap akhir dari tujuannya yaitu mengubah perilaku masyarakat secara konkret berupa tindakan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan. Sasaran kampanye juga harus ditetapkan secara jelas agar tercapainya tujuan akhir kampanye, yaitu perubahan yang diinginkan. Kampanye seharusnya memakai bahasa yang komunikatif agar sasaran mengerti. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan cara atau upaya persuasif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapat dukungan massa dalam mencapai tujuan tertentu.

Kampanye pun harus dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. Ada beberapa jenis kampanye yang biasa digunakan yaitu: pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa, rapat umum dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan yang berlaku seperti halnya di media sosial. Bahan kampanye dikemas dalam bentuk isu yang bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui

kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu (Gani, 2014).

Beberapa jenis kampanye lainnya, yaitu kampanye dialogis, kampanye monologis dan kampanye organisasi. Kampanye dialogis bisa juga disebut dengan kampanye tatap muka tanpa media perantara. Kampanye dialogis umumnya dilakukan di suatu gedung atau tempat yang luas yang memuat banyak orang sebab kampanye dilakukan dengan cara berpidato dengan gaya retorik dan juga dilakukan tanya jawab. Kampanye dialogis juga dapat dilakukan melalui media interaktif atau media massa.

Kampanye monologis yaitu kampanye massa adalah kampanye yang dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan karena ditujukan kepada massa. Gaya kampanyenya dengan menampilkan juru kampanye untuk berorasi dan pidato secara bergantian. Dalam hal ini politik berjalan satu arah tanpa dialog. Kampanye juga dapat dilakukan di media massa seperti televisi, radio, iklan yang mengandung banyak unsur persuasif. Media lain yang dapat digunakan dalam menjangkau massa yaitu surat kabar, spanduk, baliho, poster dan selebaran. Kampanye organisasi merupakan kampanye yang mengandalkan dukungan organisasi seperti partai politik, organisasi sosial dan kelompok penyokong. Tanpa dukungan organisasi, kampanye politik akan kurang efektif dan sangat tidak efisien (Arifin, 2011, p. 155).

Dewasa ini, media dan politik tidak bisa terpisahkan karena media terutama media massa datang untuk menyampaikan segala informasi yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Menurut Habermas dalam (Shirazi, 2013:06) media massa yang didasarkan pada teknologi komunikasi massa sejatinya mempunyai kekuatan dalam pembentukan opini publik. Media massa seperti media sosial menurut Hacker dan van Dijk dalam (Shirazi, 2013:06) berperan dalam proses demokrasi dimana dapat menyediakan informasi untuk masyarakat tanpa adanya batasan waktu, tempat dan kondisi fisik lainnya. Aktor komunikatif harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang masyarakat butuhkan untuk proses

pemahaman dengan tingkat validitas yang tinggi dengan tujuan: untuk mengekspresikan dirinya secara jelas, membuat sesuatu yang dapat dipahami oleh masyarakat serta dapat mempengaruhi tindakan sosial (Shirazi, 2013, hal. 06).

Melalui media massa, komunikasi politik dapat dilakukan dengan menyertakan jutaan orang dari seluruh dunia tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Kehadiran media tersebut, mendorong retorika, propaganda, agitasi, kampanye berkembang lebih pesat lagi. Penggunaan media massa dalam komunikasi sangat penting karena memiliki kontribusi yang besar dalam demokrasi. Media massa juga dipandang memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam membangun opini dan pengetahuan bagi khalayak. Aspek penting dari media adalah kemampuan dalam membentuk pendapat umum yang mendorong sikap dan perilaku khalayak atas suatu isu politik tertentu (Arifin, 2011, p. 161).

Dengan fasilitas media sosial yang kian menjamur, pengerahan massa ke lapangan terbuka kini memang sudah tidak diminati lagi (Sanur, 2014, hal. 02). Media sosial mempunyai empat manfaat bagi akifitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu sebagai informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan. Hagar dalam (Ardha, 2014:04) berpendapat bahwa media sosial bisa berkontribusi pada keberhasilan politik karena partai politik bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan skala dan intensitas yang jauh diatas pola kampanye tradisional (Ardha, 2014).

Dalam kasus referendum brexit tahun 2016, UKIP (*United Kingdom Independence Party*) turut andil dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat Inggris. UKIP merupakan salah satu partai di Inggris yang sangat menginginkan masyarakat Inggris untuk satu pandangan, yaitu memilih keluar dari Uni Eropa. Seperti yang diketahui, Ketua UKIP, Farage berhasil memperoleh jutaan suara dalam pemilihan 2015, banyak di antaranya di wilayah Perburuhan dan juga Konservatif. Itu artinya UKIP memiliki cukup banyak suara di dalam masyarakat Inggris. Penampilan medianya yang

sering juga membantu memperkuat hubungan antara imigrasi dan Uni Eropa di benak masyarakat.

Secara Ideologi, UKIP menyebarkan paham *Euroscaptic* dengan cara menolak apapun kebijakan yang berhubungan dengan Uni Eropa. UKIP memposisikan diri untuk mengkritik dan mengecam segala kebijakan karena menurutnya, Inggris banyak mengalami kerugian daripada keuntungan dari segi ekonomi, politik dan sosial.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka hipotesis dalam kajian ini adalah :

UKIP (*United Kingdom Independence Party*) melakukan kampanye melalui media sosial dan media massa secara intens dengan skala besar untuk mempengaruhi masyarakat Inggris dalam referendum Brexit tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif yang diperoleh melalui data sekunder yaitu studi literatur, diutamakan berupa data tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, klipng dan diktat kuliah. Disamping itu penulis juga berusaha melengkapinya dengan menyertakan data tertulis bentuk elektronik seperti e-book dan beberapa data dari sumber internet dan literature lainnya yang dianggap memiliki relevansi terkait dengan tulisan ini.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami krisis pengungsi di Uni Eropa
2. Untuk mengetahui proses Referendum Brexit pada tahun 2016
3. Untuk mengetahui upaya UKIP (*United Kingdom Independence Party*) dalam mempengaruhi masyarakat Inggris agar memilih keluar dari Uni Eropa

G. Jangkauan Penelitian

Periode penulisan dalam sebuah penelitian sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memfokuskan tahun penelitian. Periode penelitian dapat membantu penulis dalam mencari data sesuai dengan periode permasalahan sehingga dapat lebih jelas dan lebih spesifik.

Periode penulisan dalam penelitian ini difokuskan pada tahun 2016 dimana tahun tersebut Inggris menggemparkan dunia Internasional lewat referendum brexit dan tahun sebelumnya yang masih dianggap relevan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis akan membagi tulisan ini menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian.

Bab II akan membahas tentang sistem politik di Inggris, meliputi sistem pemerintahan, sistem partai politik dan sistem pemilu.

Bab III akan membahas tentang dinamika keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meliputi sejarah bergabungnya Inggris di Uni Eropa serta pro dan kontranya.

Bab IV akan membahas tentang upaya UKIP (*United Kingdom Independence Party*) memanfaatkan isu krisis pengungsi untuk mempengaruhi masyarakat Inggris dalam referendum Brexit tahun 2016.

Bab V berisi kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan sebagai penutup penelitian.

